PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Surabaya Telp. 0318477551 Kode Pos 60236
Laman : bkd.jatimprov.go.id Pos-el : bkdjatim@gmail.com

Surabaya, 10 Juni 2026

Nomor : 800.1.12.8/4032/204.3/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : Tiga lembar
Hal : Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Periode Agustus Tahun 2027

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan dengan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Periode Agustus Tahun 2027, maka disampaikan bahwa usulan tersebut dapat kami terima mulai tanggal 15 s/d 30 Juni 2026 melalui aplikasi E-Satyalancana di Si-Master dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026.

Untuk kelancaran penyelesaian piagam dan petikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya agar memperhatikan hal-hal berikut :

1) Berkas persyaratan dibuat dalam format PDF dengan susunan :
   a. Daftar Riwayat Hidup yang telah dilengkapi dan ditandatangani (Lampiran I);
   b. Softcopy asli SK CPNS;
   c. Softcopy asli SK Pangkat Terakhir;
   d. Softcopy asli SK Jabatan Terakhir/Surat Tugas (bagi tenaga pendidik yang sudah pindah unit kerja namun belum ada SK Jabatan);
   e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (Lampiran II);
   f. Softcopy asli petikan/piagam Keppres SLKS yang sudah pernah didapatkan, jika petikan/piagam hilang dan tidak memiliki softcopy maka bisa dilampirkan surat kehilangan asli dari kepolisian setempat.

   Keseluruhan berkas tersebut dibuat dalam satu file PDF (maks 2000 kb) untuk setiap nama yang diusulkan dengan memperhatikan urutan seperti di atas.

2) Bagi PNS yang belum pernah mendapatkan Satyalancana Karya Satya dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dan 30 tahun maka diusulkan dengan kategori X Tahun dengan ketentuan dalam softfile Daftar Riwayat Hidup wajib menuliskan belum pernah mendapatkan SLKS.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3) Format pengantar usulan melampirkan nama pegawai yang diusulkan dalam bentuk potrait, sesuai format (Lampiran III) dan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur c.q. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN.
4) Penulisan nama file masing-masing usulan PDF hanya mencantumkan nama lengkap saja (contoh : AKSARA DWI HARIYANTO).
5) Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah wajib merekap hasil verifikasi SLKS pada tanggal 5 September 2026 dan disimpan dengan nama periode Agustus 2027.

Diharapkan untuk membaca dan memahami lampiran dengan cermat. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran i : DRH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	Drs. Wxxxxx, M.Si.
2.	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, xx-xx-xxxx
3.	NIP	1968xxxx1993xx1123
4.	NIP Lama (jika ada)	(isi jika ada)
5.	Pendidikan Terakhir	S2
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	Pembina Tk.I (xx-xx-xxxx)
7.	SK CPNS (TMT)	Nomor SK: xxx/xx/xx/xx Tgl: (xx-xx-xxxx)
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	Camat Xxxxxx Kab. Bogor Prov. Jabar (xx-xx-xxxx)
9.	Jenis Kelamin	Pria/~~Wanita~~ (coret yang tidak perlu)
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres)	SLKS XX Tahun Keppres 55/TK/Tahun 2016 tgl. 08/05/2016
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	tidak pernah mendapatkan hukuma disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai)	tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan di :
Tanggal :

Jabatan Atasan Langsung,	Jabatan Yang Akan Diusulkan
(ttd+stempel/barcode TTE)	(ttd/barcode TTE)
Nama Atasan Langsung NIP	Nama Calon Penerima NIP

Keterangan:

1. Kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung dan terlampir pada saat pengusulan;
2. Kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan surat keputusan yang terlampir pada saat pengusulan;
3. Kolom tanda kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal keppres satyalancana karya satya sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki);
4. Kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diiisi dengan pernyataan **"tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani";**
5. Kolom CLTN: jika tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN), maka diiisi dengan pernyataan **"tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani".**

Lampiran II : Contoh Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR : / / /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:
N I P	:
Pangkat/Gol. ruang	:
Jabatan	: Kepala Perangkat Daerah / Sekretaris Daerah / Gubenur Jawa Timur
Unit Kerja	: Provinsi Jawa Timur

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:
N I P	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

sesuai data kepegawaiannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin sedang maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2026
Kepala Perangkat Daerah/
Sekretaris Daerah/ Gubernur
Provinsi Jawa Timur

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan :

1. Untuk Guru SMA/SMK ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Lampiran III

Format Lampiran Data Usul Dalam Format Excel

No	NIP	Nama	Pangkat	Jabatan	SlksLama	NoKeppres	TglKeppres	SlksUsul	KdDaerah
1	1968xxxx1993xx1123	Drs. Wxxxxx, M.Si.	Pembina Tk.I	Camat Kxxxxx Kab. Bogor Prov. Jabar	XX	55/TK/Tahun 2016	08/05/2016	XXX	12224
2	1974xxxx2000xx2123	Ixx Mxxxx, S.Pd., M.Pd.	Pembina Utama Muda	Guru Ahli Madya SMPN 1 Jxxxxx Kab. Bogor Prov. Jabar	X	60/TK/ Tahun 2025	29/07/2025	XX	12224
3	1971xxxx1998xx1322	Hxxx Mxxxxx, M.Pd.	Pembina	Guru Ahli Madya SMPN 1 Jxxxxx Kab. Bogor Prov. Jabar	X	60/TK/ Tahun 2025	29/07/2015	XX	12224
4	1967xxxx1993xx2123	Dra. Sxxxxx	Penata Muda Tk.I	Kasi Pemerintahan Kecamatan Jasinga Kab. Bogor Prov. Jabar	X	60/TK/ Tahun 2025	29/07/2025	XX	12224
5	1972xxxx1998xx2413	Sxxxx Hxxxxxx, S.Pd.	Penata Muda	Petugas Pendataan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan Kab. Bogor Prov. Jabar	-	-	-	X	12224
Dst.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	x	x	x	x	x

Keterangan:

1. Data usul **diurutkan berdasarkan usul XXX tahun, XX tahun dan X tahun**;
2. Dari masing-masing usulan **disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi**;
3. Penulisan NIP 18 digit tanpa spasi;
4. Penulisan Nama, pangkat dan jabatan **menggunakan huruf besar dan kecil (*Capitalize Each Word*)**;
5. Penulisan Pangkat tidak boleh ditambahi golongan ruang;
6. Penulisan Nama Jabatan harus dilengkapi dengan instansi kerja dan nama Kabupaten/Kota dan Nama Provinsi;
7. Bila Nama Kabupaten/Kota dan Nama Provinsi memiliki singkatan, maka cukup ditulis singkatannya saja seperti contoh: **Kab. Tapteng Prov. Sumut**;
8. Pada kolom pangkat dan jabatan **maksimal 228 karakter** termasuk spasi dan tanda baca lainnya;
9. Penulisan gelar pendidikan menggunakan **ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)**;
10. Penulisan nomor Keppres dan tanggal Keppres seperti contoh: **60/TK/ Tahun 2025**;
11. Kode Daerah diambil dari lampiran VII;
12. Lampiran data usulan ditandatangani Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Kepala BKD masing-masing daerah.